



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2014/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan

Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Sahdan Bin Jartak, umur 38, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Security, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon I”

Meliyanti Binti Sabki Abu, umur 31, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kenagarian Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Nomor 0338/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagaimana yang telah ditambah dan diubahnya sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 16 Januari 2000, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama SABKI ABU dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : BAHRUNSYAH dan ARIFIN, dengan maskawinya Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 1. Desika, Tanggal Lahir 04 Desember 2000
 2. Novita R, Tanggal Lahir 25 November 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Hakim Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1999 bertempat di Kecamatan Blambangan Umpu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 3 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penyebutan para pihak, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan Para Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu Hakim membacakan permohonan Para Pemohon, sebagaimana yang telah ditambah dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahdan (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 1808011410100006 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Way Kanan tanggal 14 Oktober 2010, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

Bahwa disamping tertulis tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAIFUL RAHMAN Bin BIRINSAH, selaku Paman Pemohon
- II, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tanggal 16 Januari 2000
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SABKI ABU, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama BHRUNSYAH dan ARIFIN
- Bahwa pada Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sampai dengan saat Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat tidak ada yang mempersoalkannya;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Buku Kutipan Akta Nikah mereka hilang dan kepentingan lain ;

Hal 5 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 CIK IMAH Binti USMAN, selaku Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tanggal 16 Januari 2000
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SABKI ABU, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama BAHRUNSYAH dan ARIFIN
- Bahwa pada Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sampai dengan saat Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat tidak ada yang mempersoalkannya;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Buku Kutipan Akta Nikah mereka hilang dan kepentingan lain ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Blambangan Umpu, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Januari 2000 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama: SABKI ABU, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah BHRUNSYAH dan ARIFIN dengan mas kawinSeperangkat Alat Sholat . Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun tahun dan, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Blambangan Umpu namun telah hilang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah dan hidup dalam satu keluarga dan telah dikaruniai dua orang orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang masing-masing bernama SAIFUL RAHMAN Bin BIRINSAH dan CIK IMAH Binti USMAN merupakan orang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak didengar sebagai saksi (vide pasal 172 Rb.g) keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri didepan persidangan (vide Pasal 171 ayat (1) R,bg) dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.bg), maka hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai bukti tersebut telah bersesuaian atau sama lain mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2000 di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. dalam wilayah

Hal 9 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan,

Wali nikah bernama SABKI ABU dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat dan

disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini

Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- b Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. pada tanggal 16 Januari 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, dan para Pemohon telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah namun Buku Kutipan tersebut telah hilang sebagaimana dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) butir (b) Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Hakim menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahannya, dan dapat diterbitkan buku nikah baru Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Serta Petunjuk syar'i dalam kitab I' anatut Tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal 11 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sahdan Bin Jartak dengan Meliyanti Binti Sabki Abu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2000 di Dusun III Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan; ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hirjiyah oleh H. ROHMAT, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh HUSNIYATUN AINI, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim

Hal 13 dari 14 halaman Pnt. No0338/Pdt.P/2014/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ROHMAT, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

HUSNIYATUN AINI, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------|------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2 | Proses | Rp | 50.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp | 100.000,- |
| 4 | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5 | Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)